

## **Abstract**

Pada COP 15 Cina menunjukkan kebijakannya yang tegas untuk menolak target pengurangan emisi yang absolut. Implikasinya, negosiasi pada COP 15 mengalami kebuntuan, dan Cina menjadi negara yang paling disorot sebagai penyebab dari kebuntuan tersebut. Implikasinya, koalisi negara-negara Selatan mulai memiliki sentimen yang negatif terhadap kebijakan Cina pada isu perlindungan lingkungan. Dengan menggunakan kerangka teori manajemen stigma, skripsi ini mengidentifikasi bahwa kebijakan Cina pada COP 15 menunjukkan manajemen respon yang strategis terhadap tekanan stigmatisasi yang diarahkan kepadanya oleh negara-negara Utara. Stigma tersebut terbentuk dari logika labelisasi norma perlindungan lingkungan UNFCCC. Negara-negara Utara yang menjadi pelekak stigma berada di posisi hierarkis yang menguntungkan mereka dengan mendefinisikan praktik pembangunan ekonomi kepada negara-negara Selatan. Praktek pembangunan ekonomi tersebut didefinisikan oleh negara-negara Utara sebagai praktik yang ‘normal’ oleh norma perlindungan lingkungan oleh UNFCCC. Implikasi dari stigma tersebut tidak hanya bertujuan untuk mendorong kebijakan perlindungan lingkungan yang lebih ambisius, tetapi memiliki kepentingan politik tertentu dari negara-negara Utara yang melakukan pelekatan stigma. Maka dari itu, skripsi ini bermaksud untuk mengkaji pengaruh stigma terhadap pembentukan posisi kebijakan negara Cina sebagai negara Selatan.

Kata kunci: Stigma, Cina, Norma perlindungan lingkungan, UNFCCC, Negara Utara

### **Abstract**

In COP 15, China demonstrated its firm policy to reject absolute emission reduction targets. As a result, negotiations at COP 15 reached a deadlock, and China was prominently highlighted as the cause of this impasse. Consequently, a coalition of Southern countries harboured negative sentiments towards China's environmental protection policies. Using the framework of stigma management theory, this thesis identifies that China's policy at COP 15 exhibits strategic response management to the stigmatization pressure directed at it by Northern countries. This stigma arises from the labelling logic of environmental protection norms established by the UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Northern countries, who serve as the stigma assigners, hold a hierarchical position that benefits them by defining economic development practices for Southern countries. These economic development practices are deemed 'normal' according to the environmental protection norms set by the UNFCCC. The implications of this stigma are not only aimed at urging more ambitious environmental protection policies but also serve specific political interests of the Northern countries applying the stigma. Therefore, this thesis intends to examine the influence of stigma on shaping China's policy position as a Southern country.

**Keywords:** Stigma, China, Environmental protection norms, UNFCCC, Northern Countries